

**PELAKSANAAN PROGRAM UPPKS SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
PENDAPATAN KELUARGA OLEH BADAN PP, PA DAN KB
KABUPATEN KARANGANYAR**



Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Memperoleh

Sebutan Vokasi Ahli Madya (A. Md.) Dalam Bidang

Manajemen Administrasi

Oleh :

Vera Ari Kurniasih

D.1507071

PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi kependudukan saat ini baik dalam arti jumlah dan kualitas maupun persebaran merupakan tantangan yang berat bagi pembangunan bangsa Indonesia, situasi dan kondisi kependudukan di Jawa tengah jelas merupakan fenomena yang memerlukan perhatian dan penanganan secara seksama, lebih sungguh- sungguh dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang telah dan perlu terus dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas penduduk melalui program Keluarga berencana.

Program Keluarga Berencana Nasional diatur dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Dalam UU Nomor 10 Tahun 1992 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keluarga Berencana (KB) adalah : Suatu upaya peningkatan kepedulian peran serta masyarakat melalui Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kehamilan, Pembinaan Ketahanan Keluarga, Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Terlebih- lebih lagi dengan adanya banyak tingkat pengangguran yang kian bertambah, menjadikan pemerintah menjadi risau. Untuk mengatasi hal tersebut, Badan PP, PA dan KB berupaya membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan menciptakan program pemberdayaan perempuan dan ibu- ibu rumah tangga untuk meningkatkan kualitas pengelola usaha agar menjadi tenaga terampil yang dilakukan dengan lembaga pendidikan dan pelatihan serta orientasi manajemen usaha mikro keluarga.

Program keluarga berencana Nasional tak hanya menjalankan program KB guna mengatasi ledakan penduduk saja, namun juga menyelenggarakan program lain seperti kesehatan reproduksi remaja, program ketahanan keluarga serta program penguatan keluarga kecil berkualitas melalui program UPPKS.

Selama ini diketahui bahwa suami adalah merupakan kepala keluarga yang menjadi tulang punggung di dalam keluarga. Namun demikian, perlu diberadakan pembinaan

dan pengadaan suatu kelompok guna meningkatkan pendapatan. Lebih- lebih jika gaji suami masih kurang dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari- hari, atau bahkan suami yang merupakan tulang punggung keluarga tidak bekerja. Upaya pemberdayaan ini dilakukan untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan minat, semangat serta keterampilan keluarga khususnya keluarga Pra sejahtera dan keluarga Sejahtera I, diharapkan mampu memanfaatkan peluang usaha yang ada dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga.

Keluarga Pra sejahtera dan keluarga Sejahtera I adalah merupakan pembagian keluarga yang termasuk tingkat pendapatan ekonominya rendah. Dengan suatu ukuran tertentu suatu keluarga dapat dinilai termasuk golongan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. misalnya dilihat berdasarkan pola makan, Kondisi rumah, jumlah anak, harta benda yang dimiliki, serta keikutsertaan dalam ber KB.

Upaya pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga terhadap keluarga Pra S dan KS I harus tetap diprioritaskan mengingat jumlahnya yang masih cukup banyak. Keluarga ini sangat rentan terhadap guncangan social/ ekonomi yang terjadi, sehingga sangat mungkin terjadi penurunan status kesejahteraannya di waktu- waktu yang akan datang. Tentunya keadaan ekonomi yang serba kekurangan akan menimbulkan dampak yang negative bagi keluarga itu sendiri dan juga masyarakat. Faktor utama yang menyebabkan keluarga jatuh tahapannya menjadi Pra S dan KS I harus dijadikan sebagai landasan dalam program pengentasan keluarga miskin (PRA S dan KS I).

Oleh sebab itu perlu diadakan upaya peningkatan pendapatan keluarga. Oleh karena itu program UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera) sangatlah penting keberadaannya. Usaha ini membina Ibu- Ibu rumah tangga yang termasuk golongan keluarga Pra S dan KS I (Keluarga miskin) agar dapat mendapatkan penghasilan pribadi dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam di sekitar lingkungan tempat tinggalnya untuk diolah dan dikelola menjadi suatu usaha yang dapat menghasilkan pendapatan. Karena selain menambah pendapatan bagi keluarganya, penciptaan usaha melalui UPPKS juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi Ibu- Ibu yang suaminya adalah seorang pengangguran. Kabupaten Karanganyar melalui Program UPPKS yang dipercayakan kepada Badan PP, PA dan KB Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaannya membentuk Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU). Sebagai dasarnya yaitu Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 476/607 Tahun 2007 tentang Pembentukan Asosiasi Kelompok UPPKS di Kabupaten Karanganyar.

Penulis mengambil lokasi di Badan PP, PA dan KB Kabupaten Karanganyar yang kebetulan Badan tersebut diberi kewenangan untuk pelaksanaan program UPPKS Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat Tugas akhir yang berjudul “ PELAKSANAAN PROGRAM UPPKS SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA OLEH BADAN PP, PA DAN KB KABUPATEN KARANGANYAR “

B. Perumusan Masalah

Program Keluarga Berencana diketahui masyarakat hanya mengurus masalah pengendalian penduduk saja. Oleh karenanya perlu dikenalkan bahwa anggapan itu adalah salah. Program Keluarga Berencana tak hanya mengatasi masalah kependudukan, namun juga upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Mengingat pentingnya sumber pendapatan tambahan bagi keluarga Pra KS dan KS I Kabupaten Karanganyar, maka perlu dibentuk suatu program guna meningkatkan pendapatan keluarga dan membantu perekonomian keluarga yang kurang mampu yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu akan dijelaskan tentang pelaksanaan Program UPPKS. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, tentang pentingnya pengadaan program UPPKS serta untuk mencapai tujuan pengamatan sesuai dengan persyaratan guna mempermudah penyusunan Laporan Tugas Akhir, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah Pelaksanaan Program UPPKS di Badan PP, PA dan KB Kabupaten Karanganyar ?

C. Tujuan Pengamatan

Pengamatan pada dasarnya merupakan suatu upaya yang sistematis untuk menerapkan fenomena tersebut. Dalam pengamatan ini, penulis membagi tujuan pengamatan menjadi 3 bagian yaitu :

1. Tujuan Operasional

Untuk mengetahui secara jelas mengenai apa itu program UPPKS, serta bagaimana Pelaksanaan program UPPKS pada Badan PP, PA dan KB Kabupaten Karanganyar.

2. Tujuan Fungsional

Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, pertama bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang program UPPKS, kedua bagi jajaran Badan PP, PA dan KB Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan program UPPKS di Kabupaten Karanganyar. Serta bagi pihak yang tertarik dengan permasalahan dalam penulisan ini.

3. Tujuan Individual

Sebagai syarat dalam meraih gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelaksanaan Program UPPKS

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka : 488) didefinisikan sebagai berikut :

Proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).

Sedangkan pelaksanaan menurut pendapat penulis sendiri adalah merupakan tindakan nyata atas rencana yang telah ditetapkan dalam suatu program yang telah dibuat berdasarkan kebijaksanaan yang telah digariskan sebelumnya. Kegiatan pelaksanaan hanya dapat dilakukan setelah adanya rencana. Perencanaan dalam arti yang seluas- luasnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan- kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Terdapat suatu kecenderungan telah disadari bahwa pentingnya pelaksanaan rencana, sehingga hal itu sudah mulai dipertimbangkan pada saat melakukan perencanaan. Ini menunjukkan bahwa yang lebih penting adalah menyusun rencana yang betul- betul dilaksanakan dan di dalamnya telah dimasukkan unsur- unsur usaha untuk menjamin pelaksanaan yang lebih sesuai dengan rencananya.

2. Pengertian Program

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka : 702) didefinisikan sebagai berikut :

Program adalah rancangan mengenai asas- asas serta usaha- usaha yang akan dijalankan.

Sedangkan menurut M. Arif Djamaludin mengemukakan pengertian program sebagai sebuah jenis rencana yang pada dasarnya sudah menggambarkan rencana yang konkrit. Konkritnya rencana ini disebabkan karena di dalamnya telah tercantum bukan saja tujuan, kebijaksanaan serta prosedur dan aturan- aturan akan tetapi disertai pula dengan budget atau anggaran. Dengan demikian, program itu merupakan pula usaha mengefektifkan rangkaian tindakan yang harus dilaksanakan menurut bidang. Suatu rencana umumnya meliputi berbagai bidang yang masing- masing disusun dalam berbagai program dan setiap program ini tentu saja

harus dimaksudkan untuk saling menunjang pelaksanaan berbagai macam program itu.
(1977 : 13)

Sedangkan program menurut penulis sendiri adalah bahwa program sebagai suatu garis rencana yang di dalamnya mengandung seperangkat aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana program ini pada dasarnya merupakan suatu rencana yang nyata yang dalam pelaksanaannya telah tercantum tujuan, kebijaksanaan, prosedur dan aturan- aturan serta anggaran.

3 . Pengertian UPPKS

UPPKS menurut direktorat pemberdayaan ekonomi keluarga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional adalah singkatan dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera merupakan suatu program dari BKKBN yang anggotanya adalah ibu- ibu rumah tangga, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, terutama keluarga miskin yang kegiatannya memberikan pelatihan dan pendanaan bagi ibu- ibu rumah tangga agar dapat membuka lapangan usaha dengan cara memanfaatkan Sumber Daya Alam yang tersedia di lingkungan tempat tinggalnya guna diolah dan dikelola agar dapat dimanfaatkan sebagai usaha yang dapat menghasilkan pendapatan.

Tujuan dibentuknya UPPKS adalah untuk mempermudah melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif, disamping itu juga akan mempermudah berbagai pihak untuk melakukan pembinaan terhadap usaha ataupun pengembangan tenaga kerja terampil dan inovatif sehingga usaha yang dikembangkan berdaya saing.

Anggota UPPKS mayoritas adalah kaum perempuan, peserta KB dari keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. anggota lainnya dapat pula dari kalangan keluarga yang memiliki tahapan kesejahteraan yang lebih baik dan anggota masyarakat lainnya yang memiliki minat dalam pengembangan usaha kelompok.

Dalam UPPKS, harus dibentuk pengurus. Karena para pengurus inilah elemen dinamisator. Hanya dengan UPPKS yang dinamis, penuh prakarsa, berdedikasi dan kaya gagasan, suatu pilihan kegiatan ekonomi produktif akan berpengharapan untuk maju dan berkembang. Unsur dalam pengurus UPPKS terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara, bila perlu dapat dibantu dengan dibentuk seksi- seksi.

a. Ketua

Fungsi dan tugasnya adalah :

1. Memimpin dan bertanggung jawab secara keseluruhan atas keberhasilan UPPKS.
2. Menyusun rencana kegiatan bersama anggota pengurus.
3. Membagi tugas pengurus dan anggota
4. Mengendalikan kegiatan administrasi
5. Mendorong dan memberi contoh kepada anggota untuk selalu memenuhi peraturan
6. Menghubungi mitra usaha
7. Menghubungi petugas untuk pembinaan anggota

b. Sekretaris

Fungsi dan tugasnya adalah :

1. Menyelenggarakan segala kegiatan surat menyurat
2. Menerima surat masuk dan menyampaikan kepada ketua
3. Menyiapkan jawaban surat dan mengirimkannya setelah disetujui ketua.
4. Menyiapkan surat edaran, undangan, pertemuan dan sebagainya.
5. Menyiapkan acara pertemuan sesuai jadwal
6. Menyampaikan hal- hal yang dipermasalahkan kepada ketua
7. Mengisi dan mengirimkan laporan
8. Menyimpan arsip- arsip dan dokumen penting
9. Mencatat dan merangkum hasil rapat dan menginformasikannya kepada anggota

c. Bendahara

Fungsi dan tugasnya adalah :

1. Menyediakan pelayanan keuangan
2. Mencatat keluar masuknya uang
3. Menyetorkan uang tunai ke bank
4. Membuat bukti pengeluaran dan pemasukan uang
5. Mencatat kekayaan
6. Membuat laporan keuangan
7. Memberikan pelayanan simpan pinjam untuk anggota

8. Menagih pengembalian pinjaman pada waktunya.

d. Seksi

Seksi dibentuk dengan tujuan agar segala kegiatan usaha ekonomi produktif dapat berjalan lancar dan mencapai sasaran seperti yang diharapkan. Dengan adanya seksi- seksi tersebut diharapkan terjadi pembagian tugas dan tanggung jawab secara khusus dalam UPPKS sehingga pencapaian tujuan menjadi lebih mudah.

Seksi tak harus dibentuk, seksi dibentuk sesuai dengan kebutuhan. dalam mencapai tujuannya serta mempertimbangkan potensi kemampuan anggota yang akan ditempatkan pada posisi seksi- seksi itu.

1. Seksi usaha bertanggung jawab dalam mengembangkan usaha mulai dari penilaian kelayakan usaha dan perencanaan, sampai dengan pelaksanaan usaha.
2. Seksi produksi bertanggung jawab dalam mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dipasarkan.
3. Seksi pemasaran bertanggung jawab dalam memasarkan hasil produksi
4. Seksi kemitraan bertanggung jawab dalam mencari pihak yang dapat membantu kelancaran usaha

4, Pelaksanaan Program UPPKS sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga

Pelaksanaan program UPPKS sebagai upaya peningkatan pendapatan keluarga haruslah digalakkan demi meningkatkan pendapatan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya keluarga miskin Pra KS dan KS I. oleh karena itu, sangatlah penting bagi masyarakat di suatu daerah memiliki keterampilan, pengetahuan dan pemanfaatan apa yang ada di sekitarnya untuk bisa dijadikan usaha guna meningkatkan pendapatan keluarga. Olehkarenanya perlu adanya pengetahuan tentang program UPPKS di suatu wilayah. Serta pelaksanaan program UPPKS guna meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.

Sesuai dengan keputusan Bupati Karanganyar tahun 2008 tentang pembentukan kelompok kerja program UPPKS Kabupaten Karanganyar, maka penulis akan memberikan penjelasan tentang pelaksanaan program UPPKS yang dilakukan oleh Badan PP, PA dan KB Kabupaten Karanganyar guna meningkatkan Pendapatan keluarga. Yaitu sebagai berikut :

1. Pendataan keluarga Pra S dan KS I

Merupakan pencatatan, pengumpulan informasi tentang jumlah keluarga Pra S dan KS I (keluarga miskin) di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Dasar pendataan Keluarga Badan PP, PA dan KB Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

- a. Instruksi Kepala BKKBN Nomor : 801/ HK-010/D1/2008
- b. Surat gubernur Jateng Nomor: 476/ 10487, tanggal 14 Mei 2008 tentang pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga Pra S dan KS I tahun 2008.
- c. Surat Bupati Karanganyar Nomor: 476/2983.28, tanggal 20 Mei 2008 tentang pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2008.
- d. Surat Kepala Dinas KB dan KS Kabupaten Karanganyar Nomor: 476/6426.3/V/2008, tanggal 25 Mei 2008 tentang pelaksanaan Keguatan Pendataan Keluarga Tahun 2008.

2. Pendanaan

Berkaitan dengan hal- hal yang menyangkut permodalan, sumber modal untuk pelaksanaan program. Modal bisa berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman.

Modal pinjaman, salah satunya dari Pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar yang mempunyai tim khusus untuk menyalurkan dana pinjaman. Tim penyaluran Dana Bantuan Pinjaman Modal Usaha Kabupaten Karanganyar bertugas melaksanakan :

- a. Seleksi terhadap anggota UPPKS calon penerima bantuan pinjaman modal usaha.
- b. Melaksanakan pembinaan terhadap pengurus UPPKS
- c. Mengadakan pelatihan, pembinaan dan monitoring terhadap pengurus UPPKS penerima bantuan pinjaman modal usaha.
- d. Melaporkan Pelaksanaan Tugasnya kepada Bupati Setiap Bulan.

3. Pelaporan

Merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Badan PP, PA dan KB Kabupaten Karanganyar ke BKKBN Provinsi di Semarang. Pelaporan bisa dilakukan secara on line maupun melalui dokumen yang dikirim langsung ke BKKBN Provinsi. Pelaporan ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak kelompok UPPKS di wilayah Kabupaten Karanganyar. Sehingga hal itu akan mempermudah pengawasan program UPPKS.

B. Metode Pengamatan

1. Lokasi Pengamatan

Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan dilakukan pengamatan di Badan PP, PA dan KB Kabupaten Karanganyar yang terletak di Komplek Perkantoran Cangkan JL. Lawu No. 85 Karanganyar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Dalam lokasi pengamatan terdapat masalah yang ingin dikaji dalam pengamatan ini.
- b. Dalam lokasi pengamatan, penulis mendapatkan ijin dalam melaksanakan pengamatan yang memungkinkan penulis mendapat informasi yang diperlukan.

2. Jenis Pengamatan

Pengamatan ini memakai metode deskriptif. Dimana membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual, dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan mengklarifikasinya, menganalisa dan menginterpretasinya.

Menurut pendapat Prof. Dr. Winarno Surachmad, M. Sc. Ed. (1978) menyatakan bahwa “ Metode Deskriptif tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu.”

Dengan menggunakan bentuk pengamatan deskriptif, penulis berharap menangkap dan memperoleh informasi- informasi dengan utuh sehingga dapat menggambarkan realitas bagaimana adanya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data harus dilakukan secara langsung dengan melakukan pengamatan dan penelitian di Badan PP, PA dan KB Kabupaten Karanganyar, menganalisa dan bertanya pada narasumber yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan cara sebagai berikut :

a. Observasi

Dalam pengumpulan data, penulis terlibat di dalam kegiatan sehari- hari di Badan PP, PA dan KB Kabupaten Karanganyar, di Bagian Pemberdayaan Keluarga (PK).

b. Wawancara

Dalam melakukan wawancara penulis melakukan pembicaraan secara informal kepada pegawai yang bersangkutan dengan mengajukan pertanyaan tentang masalah yang diteliti.

c. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pencatatan dari dokumen-dokumen yang berupa Peraturan Daerah, Keputusan Bupati, Memori Penyerahan P3D arsip- arsip, dan dokumen- dokumen yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis meliputi :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung melalui observasi dan interview. Observasi dilakukan langsung dengan magang di Badan PP, PA dan KB Kabupaten Karanganyar. selain itu dilakukan dengan bertanya pada Kepala dan Staff Badan PP, PA dan KB Kabupaten Karanganyar untuk menambah kelengkapan informasi tentang pelaksanaan program UPPKS.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa dokumen Perda, Keputusan Bupati serta buku- buku penunjang yang berhubungan dengan masalah penelitian. Yang diperoleh dari perpustakaan dan buku penulis pribadi. Data ini digunakan sebagai pendukung dan pelengkap data primer.

5. Metode Pengambilan Sample

Metode pengambilan sample yang digunakan adalah metode purposive sampling. Dimana penulis cenderung memilih informan yang dianggap mengerti dan mengetahui tentang masalah yang diamati secara mendalam. Informan yang dipilih dapat menunjuk informan lain yang dianggap lebih tahu sehingga informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemandirian dalam memperoleh data. Adapun yang dijadikan informan adalah Subag umum dan Kepegawaian, Ka. Sub. Bag PK (Pemberdayaan Keluarga), Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, dan staff- staff Badan PP, PA dan KB yang lain.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisa secara deskriptif, dimana data yang muncul dalam analisa deskriptif adalah berupa kata- kata dan bukan rangkaian kata, yang telah dikumpulkan dari observasi, interview dan studi pustaka serta disusun dalam teks yang diperluas. Prof. Dr. Winarno Surachmad, M. Sc. Ed.

(1978: 132) menyatakan bahwa metode diskriptif mula- mula menyusun data, menjelaskan dan kemudian dianalisa.

BAB III

DESKRIPSI LEMBAGA/ INSTANSI

A. Sejarah Singkat Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar

Awal Berdiri dengan nama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan melimpahkan kegiatan pada satu Badan Nasional. Dengan diberadakkannya Otonomi Daerah Nomor 045/ 560/ OTDA dan SE. 476/ 724/OTDA, BKKBN menyerahkan P3D (Personil, Pembiayaan, Peralatan, Dokumen) Bidang BKKBN kepada Kabupaten dan Kota. Penyerahan Satuan Kerja Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumen (P3D) Instansi Vertikal dari BKKBN yang dialihkan kepada Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan surat Nomor : 127/17597 tanggal 16 Desember 2003, bahwa Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Kabupaten Karanganyar telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 dan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 235 tahun 2003, maka BKKBN Kabupaten Karanganyar berubah nama menjadi Dinas KB dan KS.

Kemudian dengan adanya SOT (Satuan Organisasi Terpadu) serta Perda Nomor 3 tahun 2009 tanggal 12 Januari tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Karanganyar, Dinas KB dan KS berubah nama menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana/ PP. PA. KB/ BP3AKB.

B. Rincian Personal, Pembiayaan, Peralatan, Dokumen (P3D) BP3AKB Kabupaten Karanganyar

1. Personal

Jumlah personal (Pegawai) BP3AKB Karanganyar berdasarkan P3D tanggal 22 Desember 2003 adalah : 166 orang

1.1 Jumlah pegawai menurut golongan

- Golongan IV : 5 orang pegawai
- Golongan III : 138 orang pegawai
- Golongan II : 23 orang pegawai

1.2 Jumlah pegawai menurut pendidikan dan lokasi kerja

Tabel I

Lokasi	SLP	SLA	SM/AK	S-1	S-2	Jumlah
Kab (Staf Kantor)	3	24	1	24	-	52
Kec (Petugas Lap)	1	69	2	40	2	114
Jumlah	4	93	3	64	2	166

Sumber : P3D BPA3KB tahun 2003.

C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Keberadaan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar sangatlah penting . BP3AKB membantu Program Keluarga Berencana Nasional dalam mengendalikan tingkat kelahiran melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan . Upaya tersebut terutama diprioritaskan bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil yang sulit dijangkau pelayanan atau pada daerah tertinggal.

Secara bersamaan dilakukan peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan keluarga yang lebih baik, termasuk dalam rangka pendewasaan usia perkawinan pertama melalui upaya – upaya peningkatan pemahaman dan peningkatan derajat kesehatan reproduksi remaja. Selain itu juga dilakukan upaya program ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuh kembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga khususnya bagi Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (keluarga miskin), peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerja sama dengan masyarakat luas.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta PP Nomor 47 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) , maka jelas bahwa Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) merupakan salah satu

dari 28 urusan wajib (Pasal 7), hal ini berarti bahwa Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat sehingga Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakannya.

Tugas utama BP3AKB Kabupaten Karanganyar yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Sedangkan fungsi dari BP3AKB Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang meliputi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga serta kesekretariatan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana yang meliputi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga serta kesekretariatan.
4. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
5. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Visi dan Misi

Visi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Karanganyar yaitu mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender, kesejahteraan dan perlindungan anak serta keluarga kecil berkualitas menuju Karanganyar tenteram, demokratis dan sejahtera.

Sedangkan misi dari Badan Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM dan penyetaraan Gender di semua bidang pembangun.
2. Meningkatkan perlindungan tanpa kekerasan bagi perempuan dan anak.

3. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
4. Meningkatkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera menuju keluarga berkualitas.

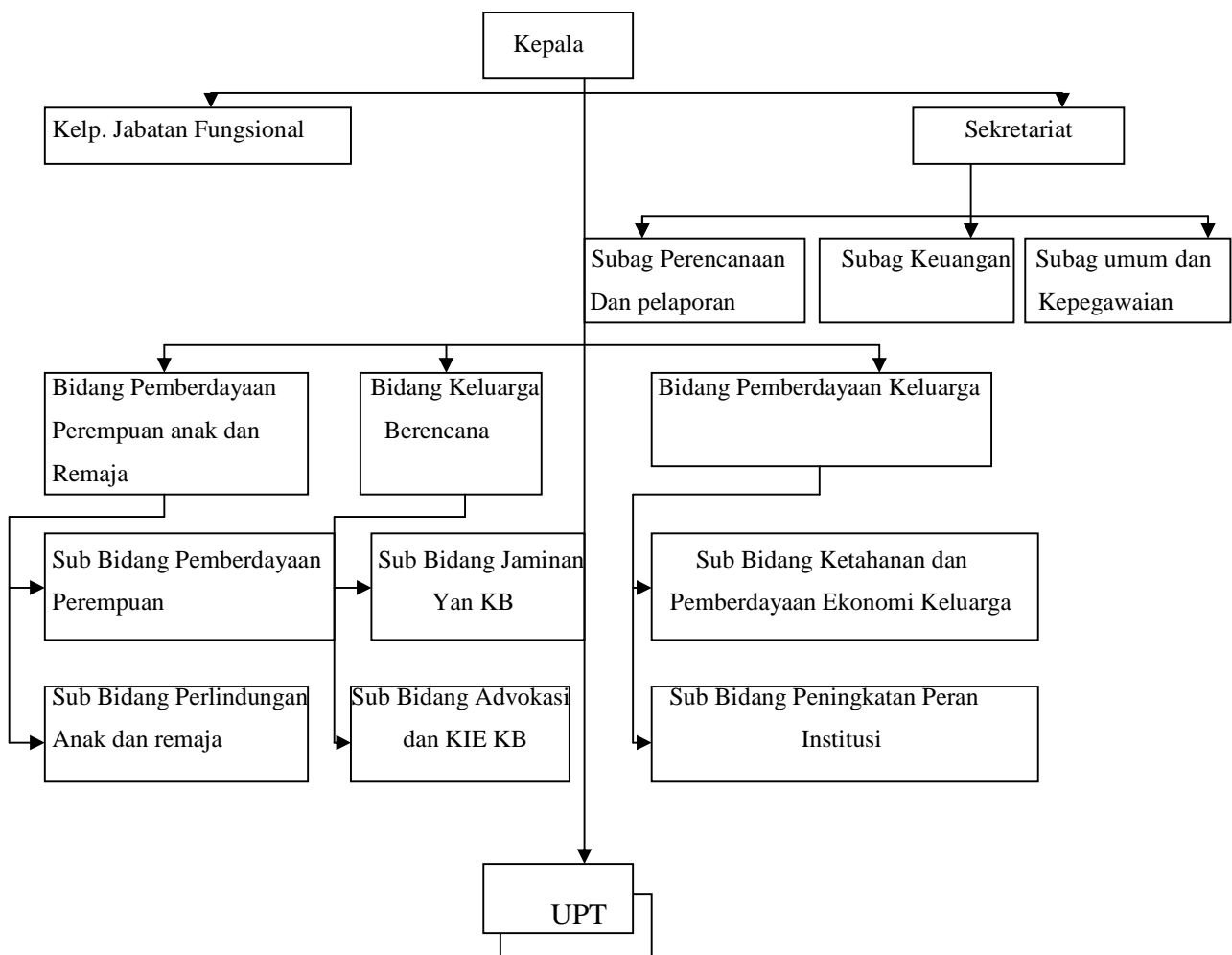
E. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Karanganyar terdiri dari:

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat :
 - 2.1 Sub Bagian Perencanaan.
 - 2.2 Sub Bagian Keuangan.
 - 2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/ PP. PA
 - 3.1 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan.
 - 3.2 Sub Bidang Perlindungan Anak, Remaja dan (Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak) KAHIBA.
4. Bidang Keluarga Berencana/ KB.
 - 4.1 Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana.
 - 4.2 Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB.
5. Bidang Pemberdayaan Keluarga/ PK.
 - 5.1 Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
 - 5.2 Sub Bidang Peningkatan Peran Institusi.
6. Unit Pelaksana Teknis.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Bagan Berikut :

Gambar I
Bagan Struktur Organisasi
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten
Karanganyar
(Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tanggal 12 Januari Nomor 03 tahun 2009)



Berdasarkan peraturan Bupati Karanganyar Nomor 29 tahun 2009 tentang uraian tugas dan fungsi jabatan structural pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar penulis akan menguraikan tugas dan fungsi masing-masing bagian Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian di Lingkungan Badan.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Badan.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Badan.

5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Badan.

6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kepala Bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan,

membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Remaja dan KHIBA (Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak)

7. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan

Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan.

8. Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak, Remaja dan KHIBA

Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak, Remaja dan KHIBA mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan di Bidang Perlindungan Anak, Remaja dan KHIBA.

9. Kepala Bidang Keluarga Berencana

Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Keluarga Berencana.

10. Kepala Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

Kepala Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan di Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana.

11. Kepala Sub Bidang Advokasi dan KIE KB

Kepala Sub Bidang Advokasi dan KIE KB mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan di Bidang Advokasi dan KIE KB;

12. Kepala Bidang Pemberdayaan Keluarga

Kepala Bidang Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Keluarga.

13. Kepala Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Kepala Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Keluarga dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan di Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

14. Kepala Sub Bidang Peningkatan Peran Institusi

Kepala Sub Bidang Peningkatan Peran Institusi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Keluarga dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan di Bidang Peningkatan Peran Institusi.

15. Kepala UPT PP, PA dan KB Kecamatan

Kepala UPT PP, PA dan KB mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Badan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana di wilayah Kecamatan.

16. Kepala UPT Sistem Informasi Gender dan Keluarga Berencana

Kepala UPT Sistem Informasi Gender dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Badan di UPT Sistem Informasi Gender dan Keluarga Berencana.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan program UPPKS sebagai upaya peningkatan pendapatan keluarga

Pelaksanaan program UPPKS sebagai upaya peningkatan pendapatan keluarga adalah ketentuan dan penjelasan yang berisi kegiatan apa saja yang dilakukan UPPKS guna meningkatkan pendapatan keluarga di Pra S dan KS I di Kabupaten Karanganyar.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, UPPKS yang berpusat di Badan PP, PA dan KB Kabupaten Karanganyar melaksanakan programnya sebagai berikut :

1. PENDATAAN KELUARGA PRA S DAN KS I

1.1 GAMBARAN UMUM

Menurut Buku Petunjuk Pendataan Keluarga Kabupaten Karanganyar Badan PP, PA dan KB Kabupaten Karanganyar adalah :

a. Letak dan Keadaan Geografi Kabupaten Karanganyar terletak antara :

110 40 – 110 70 Bujur Timur dan

70 28 - 70 46 Lintang Selatan

Ketinggian rata – rata tanah 511 m diatas permukaan laut serta beriklim tropis dengan temperatur antara : 22° C – 31° C.

b.. Luas Wilayah

luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378.673 Ha dengan batas :

Sebelah Utara : Kabupaten Sragen

Sebelah Timur : Kabupaten Magetan

Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo

Sebelah Barat : Kota Surakarta & Kabupaten Boyolali

c. Wilayah Administrasi

Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 Kecamatan, 177 Desa/ Kelurahan (162 Desa, 15 Kelurahan).

Jumlah Dusun/ RW : 1.179

Jumlah RT : 6.359

Nama- Nama Kecamatan di Kabupaten Karanganyar antara lain :

- Kecamatan Colomadu
- Kecamatan Karang Pandan
- Kecamatan Matesih
- Kecamatan Gondang Rejo
- Kecamatan Jatiyoso
- Kecamatan Jumapolo
- Kecamatan Jumantho
- Kecamatan Jenawi
- Kecamatan Kerjo
- Kecamatan Karanganyar
- Kecamatan Jaten
- Kecamatan Ngargoyoso
- Kecamatan Kebakkramat
- Kecamatan Tawangmangu
- Kecamatan Jatipuro
- Kecamatan Mojogedang
- Kecamatan Tasikmadu

d. Kependudukan

Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar seluruhnya yaitu 847.563 dengan rincian :

Laki- Laki : 423.485

Perempuan ; 424.078

1.2 TUJUAN PENDATAAN KELUARGA PRA S DAN KS I

Tujuan diadakannya pendataan keluarga Pra S dan KS I ini adalah untuk mengetahui berapa banyak keluarga yang tergolong dalam keluarga Pra S dan KS I. Keluarga Pra S dan KS I adalah merupakan keluarga yang kurang mampu/ miskin, yang memerlukan bantuan guna menyejahterakan kehidupannya.

Penggolongan keluarga apakah termasuk keluarga miskin atau tidak, ini didasarkan pada ;

- a. Tidak bisa makan 2x sehari atau lebih

- b. Tidak bisa menyediakan daging/ ikan/ telur sebagai lauk pauk paling kurang seminggu sekali.
- c. Tidak bisa memiliki pakaian yang berbeda untuk setiap aktivitas.
- d. Tidak bisa memperoleh pakaian baru minimal 1 stel setahun terakhir.
- e. Bagian terluas lantai rumah dari tanah
- f. Luas lantai rumah kurang dari 8 M² per penghuni rumah.
- g. Tidak ada anggota keluarga berusia > 15 tahun mempunyai penghasilan tetap.
- h. Bila anak sakit, ingin ber KB tidak bisa ke fasilitas kesehatan.
- i. Anak berumur 7-15 tahun tidak bisa sekolah.

Terdapat indikator- indikator yang berpengaruh dalam menentukan tahapan pada suatu keluarga, indikator itu disebut dengan data mikro KS, antara lain :

1. Agama

Melaksanakan ibadah, agama merupakan suatu pengakuan manusia, bahwa kehidupan sebagai manusia memerlukan kekuatan batin, petunjuk dan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam indikator keagamaan “melaksanakan ibadah” merupakan salah satu ukuran dari pentahapan kesejahteraan keluarga. Keluarga yang telah melaksanakan ibadah secara teratur dan dapat mengupayakan peningkatan pengetahuan agamanya diharapkan kehidupan keluarga akan mampu menjaga kualitas keimanan dan ketaqwaannya yang pada akhirnya akan terbentuk keluarga yang sejahtera, keluarga yang sakinah.

2. Pangan

Makna utama yang terkandung dalam indikator ini adalah untuk mengetahui kemampuan keluarga dalam menyediakan makanan pokok bagi anggota keluarga. Selanjutnya untuk mengetahui tahapan keluarga yang lebih tinggi mereka harus menyediakan makanan yang bergizi sebagai langkah untuk meningkatkan Sumber daya Manusia.

3. Sandang

Indikator ini menanamkan bagi setiap orang untuk bersifat fungsional, artinya menempatkan dan mempergunakan sesuatu sesuai dengan fungsinya serta memenuhi etika yang berlaku terutama dalam berpakaian.

4. Papan

Indikator ini untuk melihat kemampuan dan kesadaran keluarga dalam menyediakan rumah sebagai tempat berlindung dan hunian yang sehat dan nyaman. Disamping itu untuk menjelaskan bahwa lantai rumah dari tanah, tidak baik terhadap kesehatan bagi penghuninya, karena tanah merupakan tempat yang mudah untuk berkembang biak cacing tanah dan berbagai kuman penyakit. Lagipula lantai dari tanah sulit untuk dibersihkan dan terkesan kotor. Disamping itu rumah yang sehat perlu penataan ruang yang baik dengan memberikan ruang gerak bagi penghuninya yang cukup, sehingga diperlukan luas rumah paling kurang 8 M² untuk setiap penghuni.

5. Kesehatan

Indikator ini untuk melihat sejauh mana kondisi fisik anggota- anggota keluarga, dengan tiga bulan terakhir, apakah sehat secara fisik dan tidak terganggu dalam melaksanakan fungsinya.

6. Pendidikan

Keluarga sejahtera, keluarga yang dapat membangun keluarga secara mandiri dengan demikian diperlukan kemampuan membaca terhadap lingkungan maupun membaca tulisan. Sehingga diharapkan keluarga tersebut berkembang seiring dengan globalisasi informasi yang dapat membendung hambatan- hambatan yang mempengaruhi. Untuk itu perhatian ditujukan bagi anak berusia sekolah pada setiap keluarga Indonesia.

7. Keluarga Berencana

Inti dari Indikator ini untuk melihat sejauh mana keluarga telah memahami serta mempraktekkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera dalam kehidupan. Untuk itu diharapkan akan kualitas pemahaman terhadap program KB dari pada sekedar melaksanakan tanpa mengetahui tujuan.

8. Tabungan

Tujuan dari indikator ini sebagai proses mendidik untuk menyisihkan sebagian penghasilan, baik berupa uang tunai maupun barang untuk kebutuhan masa depannya, serta untuk mengatasi kebutuhan yang mendesak.

9. Interaksi dengan lingkungan

Makna yang terkandung dalam indikator ini yaitu sebagai proses menanamkan kebiasaan baru bagi sebagian keluarga agar dapat menyempatkan dirinya minimal sekali sehari duduk dan makan bersama. Sehingga diharapkan dapat memberikan waktu bagi keluarga terutama anak yang selalu ditinggal yang pada gilirannya mereka dapat menyampaikan keinginan dan masalah- masalah yang dihadapinya. Dengan demikian akan tumbuh rasa kekerabatan dengan kebiasaan berbagi rasa dan perasaan melalui interaksi dalam keluarga.

10. Peranan dalam masyarakat

Indikator tersebut merupakan perwujudan dari pengembangan lebih lanjut dari keluarga- keluarga setelah mampu memenuhi kebutuhan dasar dan sosial psikologisnya dan juga memiliki kepedulian akan lingkungan ditambah lagi mempunyai rasa kesetiakawanan sosial. Dengan demikian diharapkan akan tumbuh dalam diri keluarga tersebut pengabdian untuk sesama yang pada akhirnya menjadi suatu keyakinan sesuai dengan ajaran rohaniah.

Dengan diberadakannya pendataan, maka dapat diketahui apakah keluarga tersebut layak mengikuti program UPPKS atau tidak. Pendataan ini juga dimaksudkan untuk meneliti jumlah dan keberadaan Sumber Daya Alam di lingkungan sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan usaha.

Seperti penjelasan yang diberikan oleh Ibu Fitri Djamilah Sari, selaku staff BP3AKB bagian Pemberdayaan Keluarga (Wawancara,4 Februari 2010) bahwa :

“Tujuan utama program UPPKS adalah menjadikan keluarga golongan Pra S dan KS I menjadi keluarga yang sejahtera. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.”

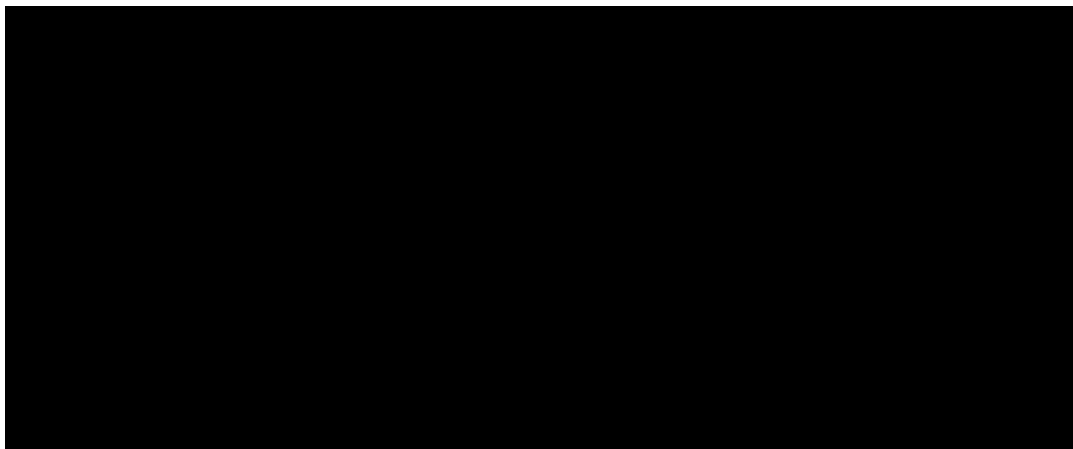
1.3 PELAKSANAAN PENDATAAN

Pendataan keluarga Pra S dan KS I dilakukan setiap dua tahun sekali oleh petugas PKB. Pendataan dilakukan melalui puskesmas di setiap Kecamatan dengan mengisi formulir pendataan keluarga.

Hasil dari pendataan keluarga Pra S dan KS I Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

Keberadaan jumlah anggota UPPKS berusaha pada bulan Desember 2006 sebesar : 6.465 keluarga dengan anggota kelompok UPPKS sebesar : 352.372 atau setiap kelompok kegiatan UPPKS beranggotakan 54 – 55 keluarga, sedangkan keluarga anggota UPPKS yang berusaha bulan Desember 2006 realisasinya baru mencapai **62,96 %** atau 197.914 keluarga dibandingkan dengan sasaran kinerja sebesar 314.371 keluarga. Lebih lanjut apabila dilihat dari perkembangan persentase keluarga anggota kelompok UPPKS yang aktif hadir dalam pertemuan dimana persentase pencapaian sasaran kinerja keluarga anggota UPPKS yang aktif tertinggi pada bulan Desember :sebesar 62.96 % dan yang terendah pada bulan Januari 40.60 %.

Kalau dilihat perkembangannya sejak awal tahun 2006 Januari sampai dengan Desember 2006 ada peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar **22,36 %**, dan perkembangan setiap bulannya adalah sebagai berikut :

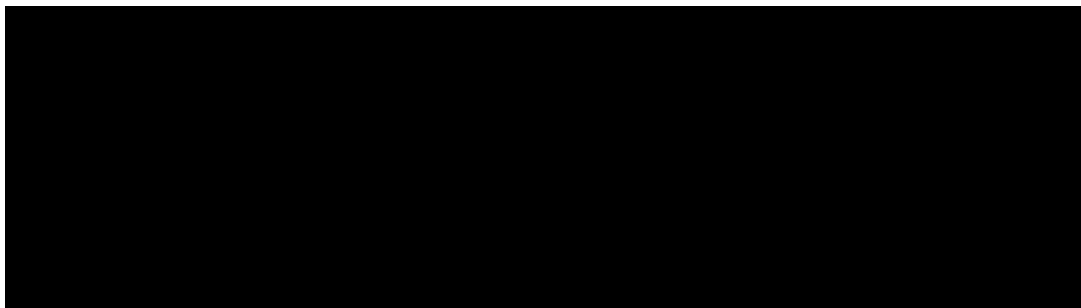


Grafik I

Sumber : BP3AKB Bagian Pemberdayaan Keluarga

Sedangkan tahun 2008, jumlah anggota UPPKS yang berusaha sebanyak: 22.256 dengan Keluarga yang menjadi anggota kelompok UPPKS sebesar : 662.466 atau setiap kelompok kegiatan UPPKS beranggotakan : 29 – 30 keluarga ,sedangkan Keluarga UPPKS yang aktif bulan Desember 2008 baru mencapai **71.57 %** atau sebesar 426.172 Keluarga dibandingkan dengan sasaran kinerja sebesar 595.482 Keluarga.

Lebih lanjut apabila dilihat dari perkembangan persentase keluarga anggota kelompok UPPKS yang aktif hadir dalam pertemuan dimana persentase pencapaian sasaran kinerja keluarga anggota UPPKS yang aktif tertinggi pada bulan April :sebesar 74.09 % dan yang terendah pada bulan Januari 63.43 %. Kalau dilihat perkembangannya sejak awal tahun 2008 Januari sampai dengan Desember 2008 ada peningkatan sebesar **8.14 %**, Persentase perkembangan jumlah keluarga anggota UPPKS yang aktif terhadap sasaran kinerja setiap bulannya adalah sebagai berikut :



Grafik II

Sumber : BP3AKB Bagian Pemberdayaan Keluarga

Lebih lanjut dapat dilihat tabel perbandingan kelompok UPPKS tahun 2006 dan 2008 Sebagai berikut :

No.	Nama Kecamatan	Anggota UPPKS berusaha Dan Anggota Pra S dan KS I	
		2006	2008
1	- Kecamatan Colomadu	35.758	30.559
2	- Kecamatan Karang Pandan	45.198	59.231
3	- Kecamatan Matesih	2.905	39.906
4	- Kecamatan Gondang Rejo	8.747	163.981
5	- Kecamatan Jatiyoso	45.393	12.645
6	- Kecamatan Jumapolo	77.565	50.887
7	- Kecamatan Jumantono	35.198	73.908
8	- Kecamatan Jenawi	25.001	45.698
9	- Kecamatan Kerjo	14.594	34.512
10	- Kecamatan Karanganyar	2.408	14.756
11	- Kecamatan Jaten	2.202	8.856
12	- Kecamatan Ngargoyoso	1.394	5.236
13	- Kecamatan Kebakkramat	2.602	9.057
14	- Kecamatan Tawangmangu	1.505	7.693
15	- Kecamatan Jatipuro	1.452	60.635
16	- Kecamatan Mojogedang	35.195	79.884
17	- Kecamatan Tasikmadu	15.255	45.820
JUMLAH		352.372	662.466

Tabel II

Sumber : BP3AKB Bagian Pemberdayaan Keluarga

2.PENDANAAN

2.1 Sumber modal program UPPKS Kabupaten Karanganyar berasal dari :

- a. Iuran simpanan pokok/ wajib, sukarela, sumbangan jasa
- b. Tabungan /simpanan
- c. Pinjaman yang diperoleh dari institusi seperti Bank BRI, Pemerintah Kabupaten dan Propinsi
- d. Sisa Hasil Usaha

2.2 Tujuan program bantuan pinjaman modal usaha Pemerintah Kabupaten Karanganyar kepada kelompok UPPKS adalah :

- a.Tersalurnya dana bantuan pinjaman modal usaha Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai upaya perkuatan modal untuk Program UPPKS.
- b.Tersalurnya modal kerja kepada program UPPKS seperti diatas, untuk kegiatan agrobisnis, ternak, pengrajin, industri kecil (industri rumah tangga) pedagang pasar, pedagang kaki lima dan lain-lain.
- c.Terlaksanannya perkuatan modal program UPPKS
- d.Tercapainya 4 (empat) sukses yaitu sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, sukses pengembalian dan sukses peningkatan pendapatan masing-masing.

2.3 Persyaratan menerima pinjaman

- a. wajib membuka rekening tabungan khusus BRI
- b. mengajukan Usulan Pinjaman yang disetujui oleh Ka.UPT Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan yang bersangkutan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Susunan pengurus
 - Daftar nomor rekening di BRI
 - Daftar nama anggota UPPKS yang akan memperoleh pinjaman, termasuk tanda-tangan dari anggota yang mengajukan pinjaman.
- c. diprioritaskan bagi anggota mempunyai usaha ekonomi produktif.

2.4 Tata Cara Pencairan

Tata cara pencairan bantuan pinjaman modal usaha pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar, tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh Pimpinan dan bendahara Badan PP, PA dan KB adalah sebagai berikut :

- a. Bendaharawan mengajukan pencairan dana ke Bidang Perbendaharaan dan Kas dilampiri nomor rekening anggota UPPKS
- b. Bendaharawan memasukkan dana bantuan pinjaman modal usaha pemerintah daerah ke rekening anggota UPPKS di BRI
- c. Anggota UPPKS penerima/terpilih mencairkan dana yang besarnya Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan persetujuan Kepala Badan PP, PA dan KB
- d. Dana bantuan pinjaman modal usaha Pemerintah Kabupaten Karanganyar disalurkan kepada anggota, yang pencairannya melalui rekening BRI atas nama anggota UPPKS.

2.5 Penggunaan dana bantuan pinjaman modal usaha pada kelompok UPPKS diatur sebagai berikut:

- a. Minimal 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk modal kerja simpan pinjam yang dipinjamkan kepada anggota untuk pengembangan usaha produktif masing-masing anggota;
- b. Maksimal 30% (tiga puluh persen) dapat digunakan untuk investasi guna keperluan pengembangan usaha bersama yang memang sangat dibutuhkan yaitu pembelian Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) ;
- c. Alokasi pemberian pinjaman untuk modal kerja bagi anggota UPPKS, maksimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap anggota;
- d. Pengelolaan bantuan pinjaman modal usaha oleh kelompok UPPKS harus dibukukan tersendiri diluar usaha lainnya.
- e. Dana bantuan pinjaman modal usaha pada kelompok UPPKS setelah lunas akan digulirkan pada kelompok UPPKS yang lain.

2.6 Pemanfaatan dan mekanisme pembayaran bunga dana bantuan pinjaman modal usaha pada kelompok UPPKS, pengalokasiannya sebagai berikut:

- a. Sebesar 4 % (empat persen) disetor ke kas daerah ,sebagai pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar;
- b. Sebesar 5 % (lima persen) dibukukan pada rekening Bidang Pemberdayaan Keluarga Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar di BRI yang digunakan untuk pembinaan, pengawasan, penagihan tunggakan, monitoring dan evaluasi

2.7 Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) penerima bantuan pinjaman berkewajiban untuk :

- a. Melakukan pembayaran angsuran atas pinjaman tersebut setiap bulan terhitung mulai bulan ke 2 (dua) sejak penyerahan pinjaman.
- b. Melakukan pembayaran Angsuran 1/12 (seper dua belas) dari pokok pinjaman setiap bulan ke rekening Pemerintah Kabupaten Karanganyar Cq.Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Bidang Pemberdayaan Keluarga
- c. Membayar bunga pinjaman setiap bulan 0,75 % .
- d. Membayar bunga pinjaman sebesar 9 % (sembilan persen) pertahun dengan perincian :
 - 4 % (empat persen) disetor ke rekening Pemerintah Kabupaten Karanganyar, sebagai pendapatan Asli Daerah;
 - 5 % (lima persen) disetor ke rekening Kelompok Kerja Pinjaman modal bergulir kelompok UPPKS sebagai dana pembinaan.

2.8 Bagian Bunga pinjaman yang disetor ke rekening Kelompok Kerja sebesar 5% (lima persen) atau Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah selanjutnya diperhitungkan 100% (seratus persen) dan dialokasikan sebagai berikut :

- a. 60 % (Enam puluh persen) atau Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelaporan pengawasan dan evaluasi di tingkat Kabupaten.
- b. 40 % (Empat puluh persen) atau Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk pelaporan, pembinaan, penagihan tunggakan di tingkat kecamatan.

Dari pelaksanaan pendanaan tahun 2008 Badan PP, PA dan KB Kabupaten Karanganyar, besarnya dana untuk program UPPKS adalah sebesar Rp. 4.554.500 dari jumlah kelompok UPPKS Pra S dan KS I sebanyak 9663 keluarga dari berbagai Kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Dengan rincian bantuan sebesar Rp. 500.000,00 untuk setiap keluarga Pra S dan KS I.

Dapat diketahui bahwa jumlah anggota UPPKS se Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 sebesar 80% dari jumlah penduduk di Wilayah Kabupaten Karanganyar. Hal itu membuktikan masih banyak penduduk yang masih rendah pendapatannya/ miskin di Kabupaten Karanganyar. Sehingga perlu diberdayakan lagi program UPPKS supaya pendapatan masyarakat miskin menjadi bertambah.

Adapun Penerima Anggaran Bantuan Modal UPPKS tahun 2008 adalah sebagai berikut :

No.	Kecamatan yang menerima Bantuan	Banyak anggota UPPKS Pra S dan KS I	Besarnya Bantuan (dalam jutaan)
1	- Colomadu	991	Rp. 261.500
2	- Karang Pandan	671	Rp. 193.500
3	- Matesih	560	Rp. 280.000
4	- Gondang Rejo	848	Rp. 424.000
5	- Jatiyoso	834	Rp. 417.000
6	- Jumapolo	1192	Rp. 596.000
7	- Jumantono	511	Rp. 255.500
8	- Jenawi	453	Rp. 271.500
9	- Kerjo	453	Rp. 271.500
10	- Karanganyar	474	Rp. 237.000
11	- Jaten	741	Rp. 370.500
12	- Ngargoyoso	463	Rp. 231.500
13	- Kebakkramat	284	Rp. 142.000
14	- Tawangmangu	193	Rp. 96.500
15	- Jatipuro	257	Rp. 137.500
16	- Mojogedang	339	Rp. 169.500
17	- Tasikmadu	399	Rp. 199.500
JUMLAH		9663	Rp. 4.554.500

Tabel III

Sumber : Laporan Evaluasi hasil Pelaksanaan Program UPPKS tahun 2008

Dari data di atas, masih ada anggota UPPKS yang belum dapat mengembalikan pinjaman modal UPPKS. Rinciannya sebagai berikut :

Tabel IV
Rincian Pengembalian Biaya Modal UPPKS
Sumber : BP3AKB Bagian Pemberdayaan Keluarga

No.	Kecamatan yang menerima Bantuan	Besarnya anggota	Yang bisa mengembalikan	Yang belum bisa mengembalikan
1	- Colomadu	991	991	-
2	- Karang Pandan	671	671	-
3	- Matesih	560	560	-
4	- Gondang Rejo	848	848	-
5	- Jatiyoso	834	834	-
6	- Jumapolo	1192	1192	-
7	- Jumantono	511	511	-
8	- Jenawi	453	453	-
9	- Kerjo	453	432	-
	• Desa Kuto			5
	• Desa Kwadungan			1
	• Desa Botok			3
	• Desa Sumber Rejo			7
	• Desa Tawangsari			3
	• Desa Ganten			2
10	- Karanganyar	474	469	-
	• Desa Lalung			3
	• Desa Delingan			2
11	- Jaten	741	741	-
12	- Ngargoyoso	463	463	-

13	- Kebakkramat	284	284	-
14	- Tawangmangu	193	193	-
15	- Jatipuro	257	257	-
16	- Mojogedang	339	339	-
17	- Tasikmadu	399	399	-
JUMLAH		9663	9637	26

Pelaksanaan program UPPKS merupakan usaha yang berguna untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dana modal UPPKS digunakan untuk kegiatan agrobisnis, ternak, pengrajin, industri kecil (industri rumah tangga) pedagang pasar, pedagang kaki lima dan lain-lain.

Berikut adalah laporan pemanfaatan modal usaha UPPKS Badan PP, PA dan KB Kabupaten Karanganyar.

Tabel V

Pemanfaatan Modal UPPKS untuk berbagai jenis usaha (dalam %)

Sumber : Badan PP, PA dan KB Kabupaten Karanganyar Bagian PK

No.	Jenis Usaha	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-rata
1	Pertanian	3,91	4,48	4,10	4,72	5,24	5,13	6,31	6,25	5,02
2	Industri Pengolahan	2,13	2,32	2,22	3,03	3,84	6,52	5,26	5,62	3,87
3	Perdagangan	2,43	1,139	2,144	1,304	5,20	7,41	2,99	3,38	8,41
4	Keuangan	3,45	3,84	3,91	3,37	5,45	6,03	5,76	5,73	4,69
5	Jasa- Jasa	2,16	5,70	5,74	6,44	3,85	5,66	4,82	4,92	4,91
6	Pengangkutan & Komunikasi	2,41	2,48	1,84	2,61	4,12	3,17	2,91	3,07	2,83
7	Listrik & Air Bersih	3,93	4,46	5,68	5,46	2,72	4,46	4,34	4,23	4,41

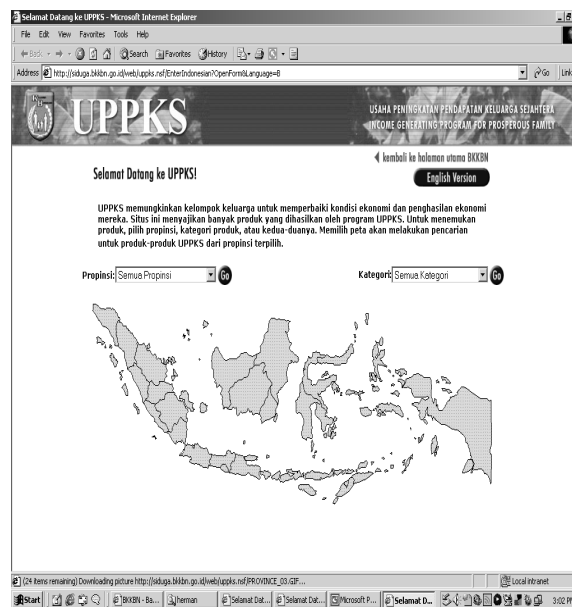
3. PELAPORAN

Setiap akhir tahunm Badan PP, PA dan KB Kabupaten Karanganyar merekap hasil pelaksanaan program UPPKS untuk dilaporkan ke BKKBN Proponsi, hal itu dimaksud untuk mengetahui jumlah keanggotaan UPPKS serta mengetahui kemunduran ataupun kemajuan program UPPKS. Agar apabila terjadi hal- hal yang tidak diinginkan bisa segera dapat diatasi. Semakin kecil laporan pendataan UPPKS, maka hal itu akan semakin baik. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga baik. Sebaliknya jika data yang dilaporkan banyak, maka banyak pula keluarga Pra S dan KS I di wilayah tersebut. Data yang perlu dilaporkan antara lain :

- Nama anggota UPPKS
- Alamat anggota
- Jenis usaha yang dikelola
- Anggaran modal yang dibutuhkan (Kecil, sedang, besar).

Dalam melakukan proses pelaporan data, Badan PP, PA dan KB Kabupaten Karanganyar melakukannya secara on line lewat internet . Yakni dengan mengakses www.bkkbn.go.id selanjutnya dipilih BKKBN PUSAT, Pilih Data Basis UPPKS, Lalu Pilih OPKA UPPKS KARANGANYAR.

Data tersebut digolongkan dari Kecamatan yang ada dikabupaten Karanganyar. Pada saat pendataan ini harus dilakukan satu persatu dan tidak boleh terjadi kekeliruan saat pemasukan data.



Gambar II
Pemasukan Data UPPKS on line

UPPKS Produk : Produk Baru - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Address http://intranet.bblan.go.id/web/uppks.nsf/Produk?OpenForm&language=6

UPPKS USAHA PERINGKATAN PENDAFTARAN KELUARGA SEHAT/SELAYUTAN
INCOME GENERATING PROGRAM FOR PROSPEROUS FAMILY

Bantuan ?

Data Kelompok:

1. Kelompok UPPKS:
 2. Propinsi: Nangro Aceh Darussalam
 3. Kabupaten: Kab Aceh Besar
 4. Kecamatan:
 5. Desa/Kelurahan:

Tempat Pemesanan/Yang Dapat Dihubungi

1. Nama Kontak:
 2. eMail Kontak:
 3. Alamat lengkap:
 4. Phone Kontak:

Data Produk:

1. Nama Produk:
 2. Kategori Produk: Bintang Ternak
 3. Bahan Produksi:
 4. Kapasitas Produksi:
 5. Deskripsi ber Bahasa Indonesia:
 6. Deskripsi ber Bahasa Inggris:

Done

Start UPPKS Produk : Produk... Microsoft PowerPoint - P... Local intranet 3:08 PM

Gambar III
Pemasukan data UPPKS on line

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam hal ini disampaikan secara ringkas materi kesimpulan diperoleh dari hasil pengamatan dan pembahasan tentang pelaksanaan program UPPKS sebagai usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera di Badan PP< PA dan KB Kabupaten Karanganyar.

UPPKS adalah singkatan dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera merupakan program dari BKKBN Nasional yang anggotanya adalah ibu-ibu rumah tangga, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, terutama keluarga miskin.

Pelaksanaan program UPPKS di Badan PP, PA dan KB Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Pendataan

Pendataan untuk kelompok UPPKS sangatlah penting sekali dilakukan. Pendataan tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah keluarga tersebut layak untuk mengikuti program UPPKS. Layak atau tidaknya keluarga untuk ikut serta dalam program UPPKS tergantung dalam penggolongan keluarga. Yaitu apakah keluarga tersebut termasuk keluarga pra KS I atau KS I atau keluarga sejahtera.

Pendataan dilakukan setiap dua tahun sekali dengan menggunakan form pendataan. Pendataan dilakukan oleh petugas PKB. Pendataan dilakukan di setiap Kecamatan se Kabupaten Karanganyar.

Keberadaan jumlah anggota UPPKS berusaha pada bulan Desember 2006 sebesar : 6.465 keluarga dengan anggota kelompok UPPKS sebesar : 352.372 atau setiap kelompok kegiatan UPPKS beranggotakan 54 – 55 keluarga, sedangkan keluarga anggota UPPKS yang berusaha bulan Desember 2006 realisasinya baru mencapai **62,96 %** atau 197.914 keluarga dibandingkan dengan sasaran kinerja sebesar 314.371 keluarga. Lebih lanjut apabila dilihat dari perkembangan persentase keluarga anggota kelompok UPPKS yang aktif hadir dalam pertemuan dimana persentase pencapaian sasaran kinerja keluarga anggota UPPKS yang aktif tertinggi pada bulan Desember :sebesar 62.96 % dan yang terendah pada bulan Januari 40.60 %.

Sedangkan tahun 2008, jumlah anggota UPPKS yang berusaha sebanyak: 22.256 dengan Keluarga yang menjadi anggota kelompok UPPKS sebesar : 662.466 atau setiap kelompok

kegiatan UPPKS beranggotakan : 29 – 30 keluarga ,sedangkan Keluarga UPPKS yang aktif bulan Desember 2008 baru mencapai **71.57 %** atau sebesar 426.172 Keluarga dibandingkan dengan sasaran kinerja sebesar 595.482 Keluarga.

Lebih lanjut apabila dilihat dari perkembangan persentase keluarga anggota kelompok UPPKS yang aktif hadir dalam pertemuan dimana persentase pencapaian sasaran kinerja keluarga anggota UPPKS yang aktif tertinggi pada bulan April :sebesar 74.09 % dan yang terendah pada bulan Januari 63.43 %. Kalau dilihat perkembangannya sejak awal tahun 2008 Januari sampai dengan Desember 2008 ada peningkatan sebesar **8.14 %**

2. Pendanaan

Sumber modal UPPKS berasal dari :

- Iuran simpanan pokok, sukarela, sumbangan jasa
- Tabungan/ simpanan
- Pinjaman yang diperoleh dari Institusi seperti Bank BRI, Pemerintah Kabupaten
- Sisa Hasil Usaha

Program pemanfaatan dana pinjaman modal usaha Pemerintah Kabupaten Karanganyar kepada UPPKS dimaksud untuk memberdayakan masyarakat anggota UPPKS khususnya bagi keluarga pra sejahtera dan KS I agar dapat meningkatkan produktifitas usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya serta memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat pada umumnya

Tujuan Pendanaan ini adalah untuk mengawasi, menyalurkan dana dari pemerintah dan institusi lain untuk pelaksanaan program UPPKS melalui Badan PP, Pa dan KB Kabupaten Karanganyar

Dari pelaksanaan pendanaan tahun 2008 Badan PP, PA dan KB Kabupaten Karanganyar, besarnya dana untuk program UPPKS adalah sebesar Rp. 4.554.500 dari jumlah kelompok UPPKS Pra S dan KS I sebanyak 9663 keluarga dari berbagai Kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Dengan rincian bantuan sebesar Rp. 500.000,00 untuk setiap keluarga Pra S dan KS I.

Dapat diketahui bahwa jumlah anggota UPPKS se Kabupaten Karanganyar pada tahun 2008 sebesar 80% dari jumlah penduduk di Wilayah Kabupaten Karanganyar. Hal itu membuktikan masih banyak penduduk yang masih rendah pendapatannya/ miskin di Kabupaten Karanganyar. Sehingga perlu diberdayakan lagi program UPPKS supaya pendapatan masyarakat miskin menjadi bertambah.

3. Pelaporan

Hasil pendataan kelompok UPPKS se Kabupaten Karanganyar di data secara on line sebagai bahan laporan ke BKKBN provinsi. Cara mengakses UPPKS lewat internet/ secara on line dengan cara mengakses www.bkkbn.go.id . data yang dimasukkan berupa nama anggota, alamat, jenis usaha, serta penggolongan dana. Pelaporan ini dilakukan setiap akhir/ awal tahun, bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah dan banyaknya UPPKS di wilayah tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis akan memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Badan PP, PA dan KB Kabupaten Karanganyar dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program UPPKS .

1. Perlu adanya tambahan sarana dan prasarana agar pemasukan data UPPKS on line tak hanya mengandalkan satu computer yang terhubung dengan jaringan internet.
2. Perlu adanya tambahan Sumber Daya Manusia ahli yang mengetahui dan mampu menguasai internet.
3. Perlu adanya penanganan khusus bagi para peminjam yang terlambat membayar pinjamannya. Kalau perlu diberikan sanksi yang tegas
4. Dalam pendataan UPPKS, hendaknya dimasukkan data- data yang lengkap. Hal itu dapat membantu pemasukan data UPPKS secara on- line, sehingga tidak akan menimbulkan kesalahan
5. Perlu diadakannya pengenalan lebih dalam lagi kepada masyarakat tentang kegiatan UPPKS

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiyanto, 2009. *Pengelolaan Usaha Kelompok*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Badan Keluarga Berencana Nasional
- BKKBN NASIONAL, 1998, *Mekanisme Operasional Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Tingkat Kecamatan dan Desa Cetakan III*, Jakarta : BKKBN NASIONAL
- Prof. Dr. Winarno Surachmad, M. Sc. Ed. 1978. *Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung : CV Tarsito
- Drs. M. Arief Djamiluddin, 1977. *Sistem perencanaan Pembuatan Program dan Anggaran*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- BKKBN, 2003, *Buku Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Keluarga melalui Kelompok UPPKS*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Badan Keluarga Berencana Nasional
- BKKBN, 2000, *Buku Petunjuk Pembinaan Takukesra Kelompok UPPKS*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Badan Keluarga Berencana Nasional
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia : Balai Pustaka
- M. Yahya Suryanegara, 1985. *Pembangunan Koperasi*, Jatinangor : IKOPIN

Sumber lain :

- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No.3 Tahun 2009 tentang *organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah, badan pelayanan, perizinan terpadu dan satuan polisi pramong praja Kabupaten Karanganyar*
- Memori Penyerahan P3D BKKBN Kabupaten Karanganyar Tahun 2003